

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG
TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diperlukan penyempurnaan terhadap susunan Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Manajemen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - b. bahwa Pejabat/Pegawai yang tertera pada lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat menjadi *Program Sponsor, Advisor, Program Manager, Project Manager, Design Manager, Change Manager, Quality Assurance Manager*, Koordinator dan Anggota pada Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Manajemen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Tim Reformasi Birokrasi dan Tim Manajemen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- Mengingat :
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
 3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014;
 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Perubahan;

5. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH NOMOR 53 TAHUN 2014 TENTANG TIM REFORMASI BIROKRASI DAN TIM MANAJEMEN PERUBAHAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

KESATU : Ketentuan pada Lampiran Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Tim Reformasi dan Birokrasi dan Tim Manajemen Perubahan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diubah, sehingga berbunyi:

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTUAL
Program Sponsor	Agus Rahardjo	Kepala LKPP
Advisor	Ikak Gayuh Patriastomo	(Plt) Sekretaris Utama
Program Manager	Robin Asad Suryo Agus Prabowo Ikak Gayuh Patriastomo	Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi Deputi Pengembangan dan Pembinaan Sumber Daya Manusia Deputi Bidang Hukum dan Sanggah
Project Manager	Salusra Widya Dwi Wahyuni Kartianingsih Dharma Nursani Setya Budi Arijanta Rita Berlis Gusmelinda Rahmi Gatot Pambudhi Poetranto	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana Kepala Biro Umum dan Keuangan Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTUAL
Project Manager	Emin Adhy Muhaemin	Direktur Pengembangan Sistem Katalog
	Tatang Rustandar W	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
	Reifeldi	Direktur Pengembangan Profesi
	Sarah Sadiqa	Direktur Pelatihan Kompetensi
	Dade Nursahid AY	Direktur Sertifikasi Profesi
	Fadli Arif	Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
	R Fendy Dharma Saputra	Direktur Penanganan Permasalahan Hukum
Design Manager	John Piter Halomoan Situmorang	Kepala Bagian Organsiasi dan Tata Laksana
	Iwan Herniwan	Kepala Bagian Program dan Anggaran
	Windy Dian TrisarI	(Plt) Kepala Bagian Kepegawaian
Change Manager	Raden Ari Widiyanto	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	M. Aris Supriyanto	Kepala Subdirektorat Barang dan Jasa
	Hermawan	Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE
	Ida Poespita	Kepala Subdirektorat Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikasi
	Irawaty Imran	Kepala Subdirektorat Wilayah II Timur
Quality Assurance Manager	Tjipto Prasetyo N	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi
	Hafiz Ashady	Kepala Bagian Keuangan
	Slamet Budiharto	Kepala Bagian Sistem Informasi

B. REFORMASI BIROKRASI

1. PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTUAL
Koordinator	Setya Budi Arijanta	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum
Anggota	Rita Berlis	Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Khusus
	Gusmelinda Rahmi	Direktur Pengembangan Iklim Usaha dan Kerjasama Internasional
	Raden Ari Widiyanto	Kepala Bagian Hukum dan Hubungan Masyarakat
	M. Aris Suprianto	Kepala Subdirektorat Barang dan Jasa
	Erwin Sondang S	Kepala Subdirektorat Badan Usaha dan Keadaan Khusus
	Zulhenny	Kepala Subdirektorat Iklim Usaha
	Mustika Rosalina Putri	Kepala Seksi Kontrak Payung
	Desi Kartika	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

2. PENATAAN PENGUATAN ORGANISASI

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTUAL
Koordinator	Sarah Sadiqa	Direktur Pelatihan Kompetensi
Anggota	John Piter Haloman Situmorang	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana
	Ria Agustina N	Kepala Subdirektorat Standar Kompetensi dan Kelembagaan
	Zulhenny	Kepala Subdirektorat Iklim Usaha
	M Iskandarsyah	Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengadaan APBN
	Katriasih Dwi H	Pengolah Data Organisasi
	Anita Carollin	Pranata Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

3. PENATAAN TATA LAKSANA

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTUAL
Koordinator	Tatang Rustandar W	Direktur Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik
Anggota	Slamet Budiharto	Kepala Bagian Sistem Informasi
	Patria Susantosa	Kepala Subdirektorat Pengembangan Aplikasi dan Teknologi Informasi
	Eko Rinaldo	Kepala Subdirektorat Keterangan Ahli Kepala Seksi Karir Pengelola Pengadaan
	Harry Sri Kahartari Sugianto	Calon Pranata Komputer

4. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTUAL
Koordinator	Dharma Nursani	Kepala Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian
Anggota	Ida Poespita	Kepala Subdirektorat Tata Kelola dan Evaluasi Sertifikat
	Windy Dian Trisari	(Plt) Kepala Bagian Kepegawaian
	Adreng Kusuma	Penelaah Bahan Pengadaan dan Mutasi
	Yohana Philip	Calon Analis Kepegawaian
	Festiana Niyanti	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

5. PENGUATAN PENGAWASAN

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTUAL
Koordinator	Dwi Wahyuni K	Kepala Biro Umum dan Keuangan
Anggota	Hafiz Ashady	Kepala Bagian Keuangan
	GAA Diah Ambarawaty	Kepala Subdirektorat Kemitraan Pemerintah dan Badan Usaha
	Arif Budiman	Kepala Subbagian Verifikasi Anggaran
	Rusli Maryadi	Kepala Seksi Kemitraan Infrastruktur
	Disty Putri R	Pengolah Data Bahan Penyusunan Anggaran
	Devi Yanurida	Bendaharawan

6. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTUAL
Koordinator	Salusra Widya	Kepala Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana
Anggota	Tjipto Prasetyo Nugroho	Kepala Bagian Pemantauan dan Evaluasi
	Iwan Herniwan	Kepala Bagian Program dan Anggaran
	Yasip Khasani	Kepala Subbagian Program
	Tri Susanto	Pengolah Data Pemantauan
	Firmansyah	Pengolah Data Penyusunan Rencana dan Program

7. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTUAL
Koordinator	Emin Adhy Muhaemin	Direktur Pengembangan Sistem Katalog
Anggota	Hermawan	Kepala Subdirektorat Pengelolaan dan Pembinaan LPSE
	Yulianto Prihandoyo	Kepala Subdirektorat Wilayah I Timur
	Dwi Satrianto	Kepala Subdirektorat Pengelolaan Katalog
	Muhammad Firdaus	Kepala Seksi Standar Kompetensi
	Ichwan Fajar Harika	Calon Perancang Peraturan Perundang – Undangan
	Himawan Giri	Calon Pustakawan
	Biantri Raynasari	Perancang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

8. MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTUAL
Koordinator	Hardi Afriansyah	Kepala Subdirektorat Riset dan Kontrak
Anggota	Tri Susanto	Pengolah Data Pemantauan
	Dara Kumala	Penata Laporan Keuangan dan SAI
	Ilvia Restu Utami	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
	Santika Wiguna	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
	Umi Nurnaeni	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
	Ketsia Aprilianny L	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
	Ermawanto	Penelaah Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

9. QUICK WINS 1 (UJIAN SERTIFIKASI PENGADAAN BARANG/JASA BERBASIS KOMPUTER)

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTUAL
Koordinator	Dade Nursahid Ahmad Yasin	Direktur Sertifikasi Profesi
Anggota	Suharti	Kepala Subdirektorat Sistem dan Sarana Sertifikasi
	Umi Nuraeni	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
	Agung Widayat	Perancang Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
	Dian Rahmayanti	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

10. QUICK WINS 2 (PENGEMBANGAN SISTEM LAYANAN BIMBINGAN TEKNIS DAN ADVOKASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH YANG TERINTEGRASI)

POSISI	NAMA	JABATAN STRUKTUAL
Koordinator	Fadli Arif	Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II
Anggota	Yulianto Prihandoyo	Kepala Subdirektorat Wilayah I Timur
	Mudjisantosa	Kepala Subdirektorat Wilayah I Barat
	Eko Rinaldo Octavianus	Kepala Subdirektorat Keterangan Ahli
	Edi Kristiyanto	Kepala Seksi Penanganan Permasalahan Kontrak Barang dan Jasa
	Rinaldi Morintosh	Kepala Seksi Keterangan Ahli Barang dan Jasa
	Deasy Rachmawati	Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Januari 2015

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,


AGUS RAHARDJO